



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON
TELEPON (0911) 361111 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 361111

LAMAN supmwaiheru-kkp.sch.id SURAT ELEKTRONIK supmwaiheruambon@kkp.go.id

Yth. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Di tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.1384/BPPSDM-SUPM.WHR/RC.610/IV/2025

NO	Jenis Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	1 Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Diterima Tanggal :

Ambon, 15 April 2025

Penerima

Kepala,

(.....)



Abdul A. Usemahu, S.St.Pi,M.S.T.Pi

NIP 198202082006041004

Nomor Telepon :

TRIWULAN I
2025



SUPM Waiheru

LAPORAN KINERJA

Sekolah Usaha Perikanan
Menengah Waiheru

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga Laporan Kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru Triwulan I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas target dan capaian kinerja SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025.

dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini mempunyai fungsi untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Triwulan I Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SUPM Waeheru dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, dimana kinerja SUPM Waeheru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waeheru Tahun 2025 yang merupakan kontrak kinerja Tahunan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dicapai oleh SUPM Waeheru melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Karyawan dan Karyawati SUPM Waeheru serta semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 SUPM Waeheru ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, monitoring dan evaluasi serta perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi sarana komunikasi dan publikasi bagi kegiatan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan khususnya SUPM Waeheru.

Ambon, 15 April 2025

Kepala SUPM Waeheru



Abdul A. Usemahu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Potensi dan Permasalahan	6
E. Keragaan SDM SUPM Waeheru.....	9
F. Sistematika Laporan Kinerja	10

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kerja Tahun 2025	18
C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waeheru	20
D. Pengukuran Kinerja	21

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama.....	23
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	25
C. Akuntabilitas Keuangan.....	44
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber daya.....	48

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama	50
B. Permasalahan dan Rekomendasi	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pagu Anggaran Tahun 2025.....	19
Tabel 2	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	20
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Utama Dengan Capaian Status Baik Triwulan I Tahun 2025	24
Tabel 4	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025.....	26
Tabel 5	Kondisi Eksisting Peserta Didik SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025.....	29
Tabel 6	Capaian IKU 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru	35
Tabel 7	Capaian IKU 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru	36
Tabel 8	Capaian IKU 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru.....	39
Tabel 9	Capaian IKU 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru.....	40
Tabel 10	Capaian IKU 17 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru.....	42
Tabel 11	Perbandingan capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan SUPM Lain	43
Tabel 12	Realisasi Anggaran per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2025.....	44
Tabel 13	Realisasi Anggaran per jenis kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025	44
Tabel 14	Realisasi Anggaran Per IKU dan Efisiensi Anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025	45
Tabel 15	Target Indikator Kinerja Utama dengan capaian TW I Tahun 2025.....	52

DAFTAR GAMBAR

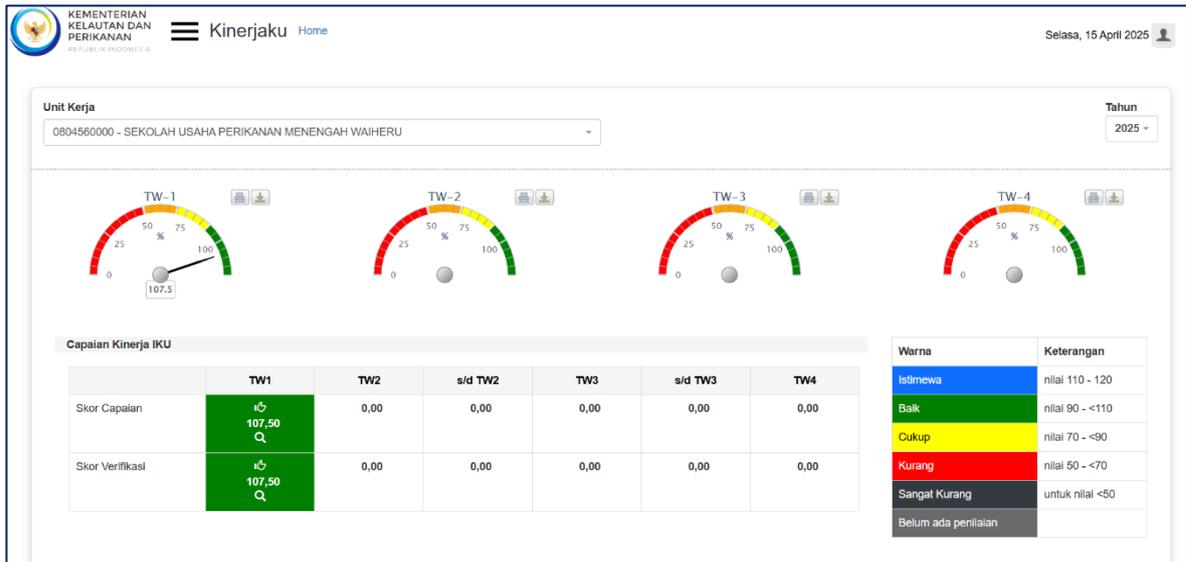
Gambar 1	Dashboard Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	vii
Gambar 2	Struktur Organisasi SUPM Waiheru	5
Gambar 3	SOTK Operasional SUPM Waeheru Tahun 2025	6
Gambar 4	Keragaan SDM menurut status kepegawaian	9
Gambar 5	Keragaan SDM menurut pangkat dan golongan	10
Gambar 6	Keragaan SDM menurut jabatan	10
Gambar 7	Dashboard Utama Aplikasi kinerja Triwulan I Tahun 2025	23
Gambar 8	Perhitungan Efisiensi Anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025	48
Gambar 9	Dashboard Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM Waeheru memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemberian pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan; pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa, dan masyarakat; pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.

Pada tanggal 30 Januari Tahun 2025 SUPM Waeheru telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala SUPM Waeheru dengan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja Utama. Adapun Pada Triwulan I Tahun 2025 SUPM Waeheru menargetkan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama sedangkan sisanya akan diukur pada Triwulan selanjutnya. Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat KPI) pada masing- masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data

capaian kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107,50 terlihat pada dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025

Selama Triwulan I Tahun 2025 dari 3 Indikator Kinerja Utama SUPM Waeheru yang ditargetkan terdapat 1 IKU Berstatus Istimewa dan 2 IKU yang Berstatus Baik sehingga secara umum kinerja SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025 tergolong Baik. Rincian target dan realisasi dari 3 indikator kinerja utama tersebut adalah :

1. Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan Target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 85 (%) dengan realisasi yang dicapai sebesar 85 (%).
2. Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan Target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 80 (%) dengan realisasi yang dicapai sebesar 100 (%)
3. Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan Target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 25 (%) dengan realisasi yang dicapai sebesar 25 (%).



BAB I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan
- Tugas dan Fungsi
- Potensi dan Permasalahan
- Keragaan SDM SUPM Waeheru
- Sistematika Laporan Kinerja



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan

3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut SUPM Waeheru berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM Waeheru sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja SUPM Waeheru dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja SUPM Waeheru ini merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SUPM Waeheru dalam rangka mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan SUPM Waeheru.

B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja SUPM Waeheru ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap urusan/bagian di SUPM Waeheru.
3. Sebagai umpan balik (Feedback) dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi SUPM Waeheru untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM Waeheru sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan dibidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekolah Usaha Perikanan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- b. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler;

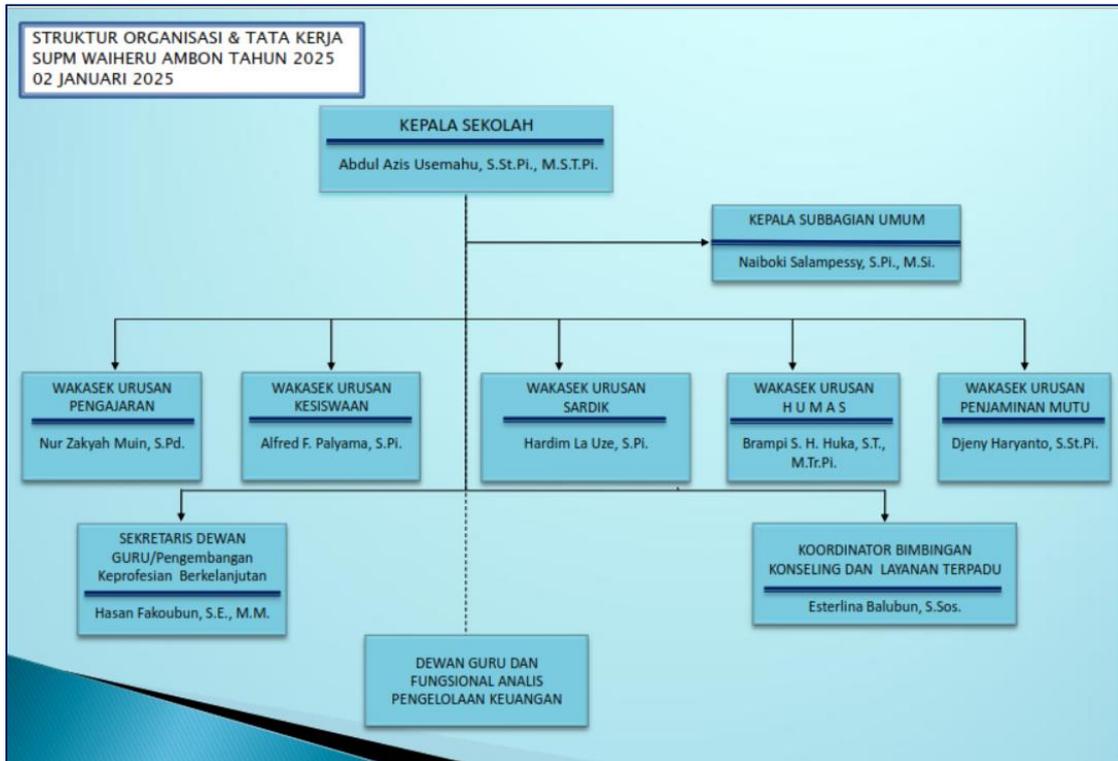
- d. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi SUPM Waeheru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi SUPM Waeheru

Mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh SUPM Waeheru, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu kepala SUPM Waeheru sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur organisasi sebagai operasional kegiatan SUPM Waeheru yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala SUPM Waeheru Nomor : 01/BPPSDM-SUPM.WHR/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SUPM Waeheru Tahun 2025, sebagai berikut:



Gambar 3. SOTK Operasional SUPM Waeheru Tahun 2025

D. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Sumberdaya Perikanan di Indonesia sangat memadai khususnya pada daerah- daerah yang merupakan wilayah kerja SUPM Waeheru, namun SDM pelaku utama bidang kelautan dan perikanan masih memiliki kualifikasi yang sangat terbatas, sehingga memerlukan peningkatan pendidikan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung peran strategis dimaksud, SUPM Waeheru memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga fungsional sebanyak 30 orang dan tenaga teknis dan administrasi sebanyak 49 orang. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilakukan sistem pembelajaran

dengan menggunakan pendekatan teaching factory 70% praktek dan 30% teori. SUPM Waeheru menerima peserta didik dari anak pelaku utama perikanan sebesar 52% pada Tahun 2020, serta penerimaan peserta didik pada Tahun 2021,2022 menjadi 55% dan 2024 serta 2025 menjadi 100% anak pelaku utama perikanan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan SUPM Waeheru memiliki 4 (Empat) program keahlian unggulan serta membekali lulusan dengan sertifikat keahlian sebagai berikut :

- 1) Program Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan dibekali dengan sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) tingkat II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan DPKP/PUKP-KAPIN Wilayah VII Ambon, Sertifikat Basic Safety Training (BST), Buku Pelaut, serta Sertifikat Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan dari LSP P1 SUPM Waeheru.
- 2) Program Keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan dibekali dengan sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat II yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan DPKP/PUKP-KAPIN Wilayah VII Ambon, Sertifikat Basic Safety Training (BST), Buku Pelaut, serta Sertifikat Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan dari LSP P1 SUPM Waeheru.
- 3) Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dibekali dengan Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Poin (HACCP) dan Sertifikat Asisten Pengolah Ikan (API) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sertifikat kompetensi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dari LSP P1 SUPM Waeheru.
- 4) Program Keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau dan Air Laut dibekali dengan Serta Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), dan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan

Yang Baik (CPPIB) yang proses penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sertifikat kompetensi Bidang Budidaya Perikanan dari LSP P1 SUPM Waeheru.

Selain itu SUPM Waeheru telah ditunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan juga sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I (LSP-P1) SUPM Waeheru yang melakukan uji kompetensi keahlian serta menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta didik SUPM Waeheru, SMK KP dan Masyarakat.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi SUPM Waeheru dalam pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025 antara lain:

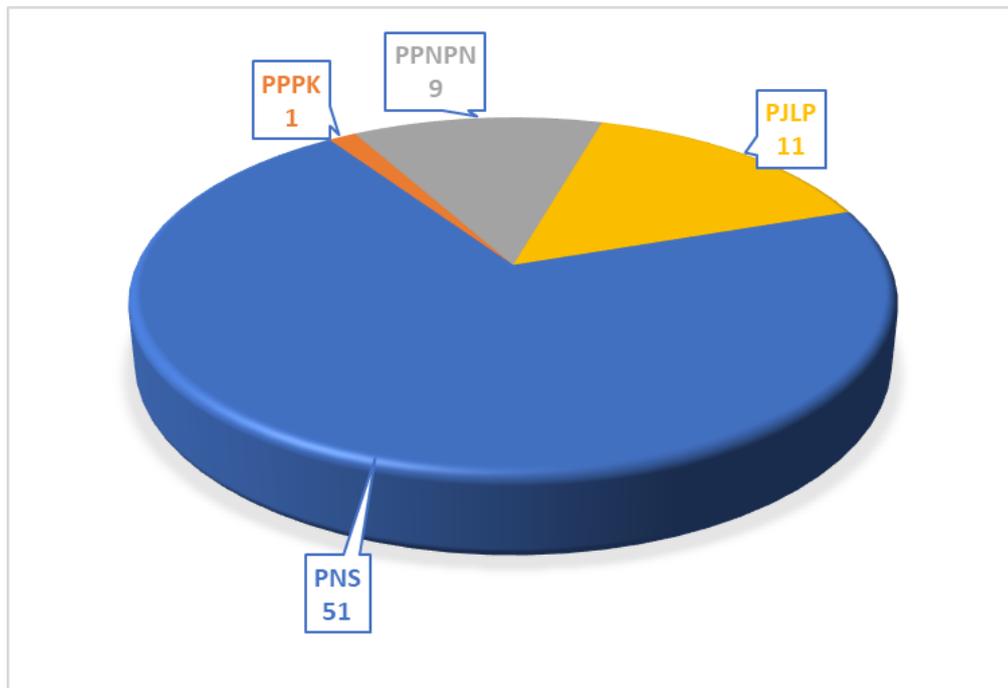
- 1) Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten sering tidak mencapai target karena adanya peserta didik yang mengundurkan diri atau dikeluarkan karena hukuman disiplin sehingga berpengaruh terhadap persentase capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025.
- 2) Belum optimalnya link and match instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing) dan serapan lulusan;
- 3) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan KP sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM sehingga diperlukan peran serta SUPM Waeheru dalam mendukung dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan tersebut;

- 4) Sarana dan prasarana pendidikan di SUPM Waeheru belum sepenuhnya terstandar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) serta Kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta didik dan kinerja organisasi.

E. Keragaan SDM SUPM Waeheru

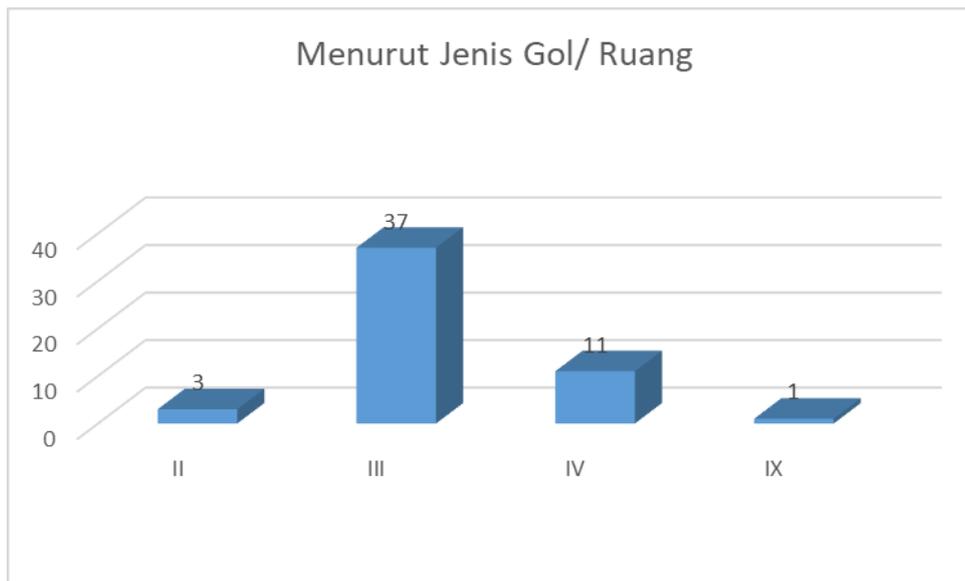
SUPM Waeheru memiliki Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebanyak 72 orang yang terdiri dari Fungsional Guru, Fungsional Instruktur, Fungsional Arsiparis, Tenaga Teknis, Tenaga Administrasi dan Asesor Kompetensi. Keragaan SDM SUPM Waeheru dibedakan dalam berbagai kategori, sebagai berikut :

1. Keragaan SDM menurut status kepegawaian



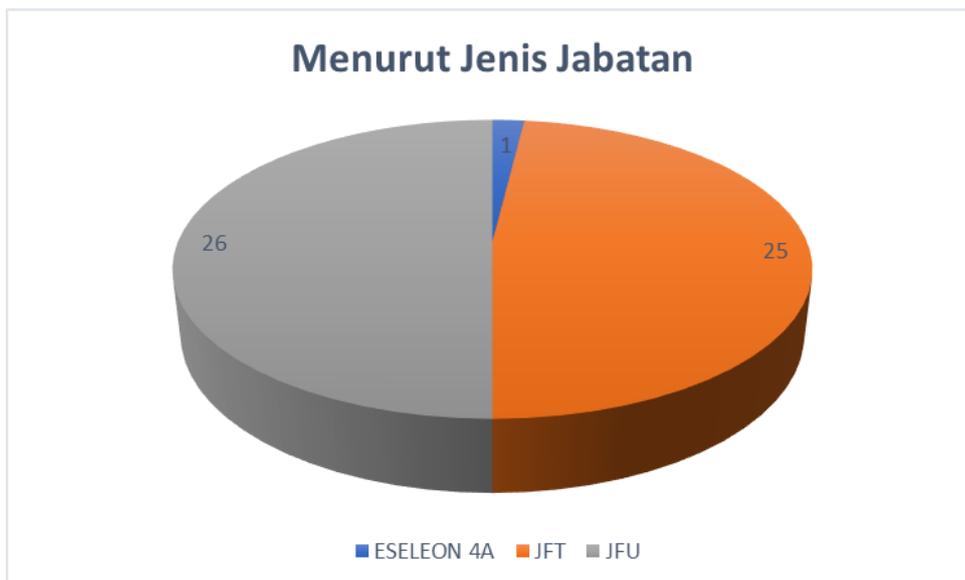
Gambar 4. Keragaan SDM menurut status kepegawaian

2. Keragaan SDM ASN (PNS dan PPPK) menurut pangkat dan golongan



Gambar 5. Keragaan SDM menurut pangkat dan golongan

3. Keragaan SDM ASN (PNS dan PPPK) menurut Jabatan



Gambar 6. Keragaan SDM menurut jabatan

F. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang SUPM Waeheru seperti tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di SUPM Waeheru.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis SUPM Waeheru 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja SUPM Waeheru Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian IKU dari indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai capaian indikator kinerja lainnya, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.



Laporan Kinerja
Triwulan I Tahun 2025

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Rencana Kerja Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja SUPM Waeheru
- Pengukuran Kinerja



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima Tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan PJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan

Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

SUPM Waeheru sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, maka SUPM Waeheru mendukung BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra- sentra produksi kelautan dan perikanan”**

yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

2. **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas .

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan;
- 2) Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (e- learning) bagi anak pelaku utama di SUPM Waeheru;
- 3) Menjadikan SUPM Waeheru sebagai rujukan (center of excellence) bagi SMK KP yang ada di wilayah kerjanya;
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien;
- 5) Mewujudkan ASN yang professional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan KKP; serta
- 6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di SUPM Waeheru dalam rangka mendukung kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 "Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten". Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya

SP-2 : Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator :

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
2. Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

SP-3 : Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Aparatur Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya

2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya
4. Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi
5. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

SP-4 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP, dengan indikator :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Dengan memperhatikan Sasaran Program BRSDMKP dimaksud, maka sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran Kegiatan BRSDM adalah sebagai berikut:

- 1) SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- 2) SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan
- 3) SK3 Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 4) SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar
- 5) SK5 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 6) SK6 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

SUPM Waeheru sebagai UPT Pusat dibawah PUSDIK KP mengacu pada sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh PUSDIK KP yaitu :

1) SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten.

2) SK2 Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan

3) SK3 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Menjabarkan misi sasaran Kegiatan Pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten", dengan indikator kinerja:

1) Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja dengan target 90 Orang pada Tahun 2025;

2) Jumlah lulusan SUPM Waeheru dengan target 107 Orang pada Tahun 2025;

3) Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten dengan target 183 orang pada Tahun 2025;

4) Nilai PNBK satker SUPM Waeheru dengan target 0,475 Miliar pada Tahun 2025;

5) Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati dengan target 1 Kesepakatan pada Tahun 2025;

6) Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi dengan target 100 % pada Tahun 2025;

7) Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru dengan target 100 % pada Tahun 2025;

sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan", dengan indikator kinerja :

1) Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru dengan target 1 Lembaga pada Tahun 2025;

2) Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi dengan target 20 Orang Pada Tahun 2025.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome SUPM Waeheru melalui Sasaran Kegiatan ke ketiga (SK-3) "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker", dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan target 85 % pada Tahun 2025;
- 2) Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru dengan dengan target Nilai 81 pada Tahun 2025;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru dengan target Indeks 84 pada Tahun 2025;
- 4) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan target 80 % pada Tahun 2025;
- 5) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru dengan target 80 % pada Tahun 2025;
- 6) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru dengan target Nilai 92 pada Tahun 2025;
- 7) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru dengan target Nilai 71,5 pada Tahun 2025;
- 8) Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan target 100 % pada Tahun 2025.

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung visi, misi dan sasaran strategis, maka SUPM Waeheru menetapkan rencana kerja Tahunan dari Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen

dengan total pagu anggaran sebesar Rp.16.337.505.000,- (Enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Akreditasi Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Anggaran Rp.15.000.000,-
2. Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Anggaran Rp.60.000.000,-
3. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten dengan Anggaran Rp.4.135.800.000,-
4. Layanan Umum dengan Anggaran Rp.60.000.000,-
5. Layanan Perkantoran dengan Anggaran Rp.12.006.705.000,-
6. Layanan Manajemen Keuangan dengan Anggaran Rp.60.000.000,-

Tabel 1. Pagu Anggaran Tahun 2025

REVISI ANGGARAN	KETERANGAN REVISI ANGGARAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU SETELAH REVISI (Rp)
REVISI I (21 Februari 2025)	Blokir Efisiensi Anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah	16.337.505.000	16.337.505.000
REVISI II (9 April 2025)	Pembukaan Blokir Efisiensi Anggaran Untuk Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik, Langganan Daya dan Jasa serta Docking Kapal Laith	16.337.505.000	16.337.505.000

Table diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 SUPM Waeheru mengalami 2 (dua) kali Revisi Anggaran yaitu pada tanggal 21 Februari 2025 terjadi Revisi pertama berupa blokir dalam rangka efisiensi anggaran, kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 April 2025 untuk pembukaan blokir efisiensi anggaran Langganan Daya dan Jasa, Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik serta Docking Kapal Latih. Semua kegiatan revisi tersebut tidak terjadi perubahan pagu anggaran.

C. Perjanjian Kinerja (PK) SUPM Waeheru

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam bidang pendidikan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan disahkan pada Tanggal 30 Januari 2025 antara Kepala SUPM Waeheru dengan Plt.Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka dibuat rencana aksi dan rincian target indikator kinerja utama (IKU) yang disajikan dalam bentuk target kinerja setiap bulannya dengan pengukuran kinerja setiap Triwulan atau tiga bulan berjalan.

Sasaran Kegiatan SUPM Waeheru yang termuat dalam perjanjian kinerja merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	90
		2	Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	107
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	183
		4	Nilai PNBP satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	0,475
		5	Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	1
		6	Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	100
2	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)	1
		9	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)	20
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	85
		11	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	81
		12	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	84
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	80
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	71,5
		17	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)	100

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama dan akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

- 1) Angka maksimum adalah lebih dari 120;
- 2) Angka minimum adalah kurang dari 70;

3) Formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



Pengukuran kinerja dilakukan dengan Perangkat Lunaka berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja SUPM Waeheru dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan), yaitu pada bulan maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SUPM Waeheru Nomor B.151/BPPSDM.SUPM-WHR/KP.440/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja SUPM Waeheru Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada portal <http://kinerjaku.kkp.go.id>. yang kemudian hasil pengukurannya dijabarkan oleh tim pengelola laporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja Triwulan dan Tahunan beserta data dukungnya untuk disampaikan kepada Kepala SUPM Waeheru sebagai penanggung jawab kegiatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Sekretaris BRSDM KP.



BAB III.

AKUNTABILITAS

KINERJA

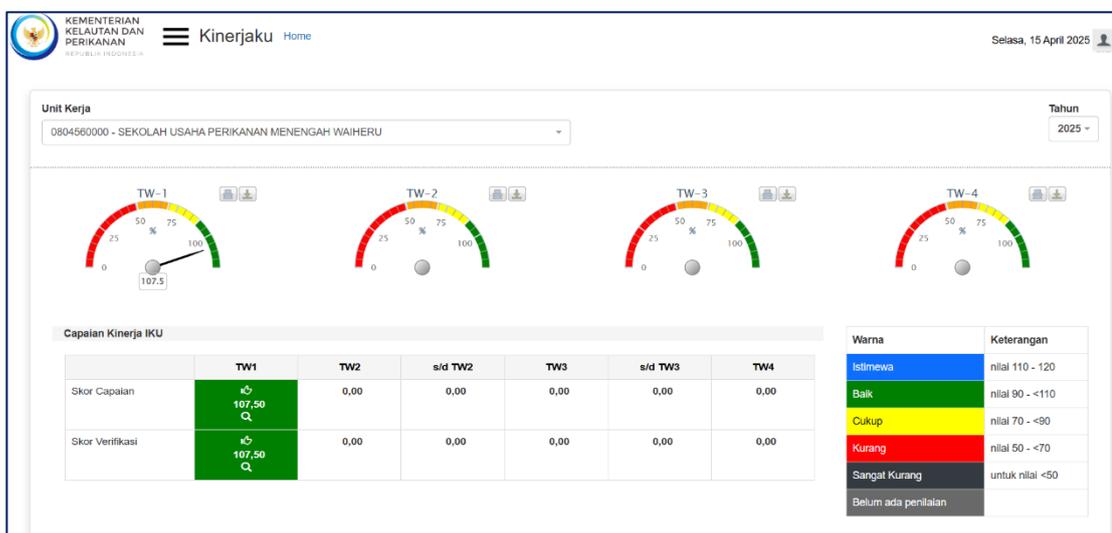
- Prestasi Indikator Kinerja Utama
- Evaluasi dan Analisis Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan
- Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerjaku dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107,50% sebagaimana pada dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 7. Dashboard Utama Aplikasi kinerjaku Triwulan I Tahun 2025

Sumber Data : <https://kinerjaku.kkp.go.id> Tanggal, 15 April 2025

Tahun 2025 SUPM Waeheru terdapat 17 Indikator Kinerja dengan target yang sudah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 3 IKU dan semua IKU Terealisasi dengan capaian Kinerja berstatus **Istimewa** dan **baik**, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. Target Indikator Kinerja Utama dengan capaian Status Baik Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I	
			TARGET	CAPAIAN
1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	90	0	0
	2 Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	107	0	0
	3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	183	0	0
	4 Nilai PNBSP satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	0,475	0	0
	5 Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	1	0	0
	6 Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	0	0
	7 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	100	0	0
2 Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	8 Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)	1	0	0
	9 Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)	20	0	0
3 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	85	85	85
	11 Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	81	0	0
	12 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	84	0	0
	13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	80	80	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I	
			TARGET	CAPAIAN
	14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	80	0	0
	15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	92	0	0
	16 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	71,5	0	0
	17 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)	100	25	25

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja sesuai dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SUPM Waeheru. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis SUPM Waeheru yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I TAHUN 2025	CAPAIAN TW I TAHUN 2025	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	0	0	0
		2	Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	0	0	0
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	0	0	0
		4	Nilai PNBPN satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	0	0	0
		5	Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	0	0	0
		6	Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi (%)	0	0	0
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	0	0	0
2	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)	0	0	0
		9	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)	0	0	0
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	85	85	100
		11	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	0	0	0
		12	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	0	0	0
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	80	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW I TAHUN 2025	CAPAIAN TW I TAHUN 2025	PERSENTASE (%)
		14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	0	0	0
		15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	0	0	0
		16 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	0	0	0
		17 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)	25	25	100

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

SUPM Waeheru merupakan satuan pendidikan lingkup KKP mengembangkan dan memaksimalkan potensi peserta didik melalui proses belajar mengajar vokasional dengan pendekatan teaching factory (Tefa) yakni 70% praktik dan 30% teori. Program pembelajaran tersebut diharapkan agar lulusan politeknik KP Maluku di SUPM Waeherun Ambon dapat terserap pada dunia industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Lulusan yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi serta ijazah sebagai syarat untuk melamar kerja pada perusahaan-perusahaan, sehingga pihak sekolah

telah melakukan pendekatan dengan berbagai perusahaan agar dapat memudahkan dan menerima lulusan untuk segera dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya pada saat adanya lulusan peserta didik Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama 2

Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)

Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di satuan pendidikan KP baik jenjang pendidikan tinggi maupun menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan.

Output dari proses pembelajaran adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan potensi diri mereka sudah berkembang dengan maksimal, sehingga siap untuk menghadapi tantangan baru setelah menyelesaikan pendidikan dengan jenjang tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya pada saat adanya lulusan peserta didik Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama 3

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)

Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sebagai satuan pendidikan dibawa Pusat Pendidikan Kelautan Perikanan,

SUPM Waeheru berperan dalam menciptakan tenaga teknis menengah yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan perikanan di wilayah kerjanya.

Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM peserta didik yang melaksanakan Pendidikan di SUPM Waeheru. Capaian indikator Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang) dengan target Tahun 2025 sebanyak 183 Orang. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan II atau Semester I Tahun 2025, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan akan tetapi dianggap perlu untuk dilaporkan kondisi eksisting jumlah peserta didik SUPM Waeheru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kondisi Eksisting Peserta Didik SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025

NO	TINGKAT	PROGRAM KEAHLIAN				JUMLAH
		NKPI	TKPI	APAPL	APHP	
1.	I	19	20	16	18	73
2.	III	42	0	36	27	105
TOTAL		61	20	52	45	178

Indikator Kinerja Utama 4

Nilai PNPB Satker SUPM Waeheru (Rp.Miliar)

Menurut UU no. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNPB adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran

pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Lainnya (Non SDA), dan PNBPN BLU. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, Pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, Pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, analisis data kelautan dan perikanan, sertifikasi, hasil samping kegiatan tusi, tanda masuk karcis masuk Kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi, denda administratif dan ganti kerugian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 pada pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan tetapi di anggap perlu untuk dilaporkan progress realisasi PNBPN SUPM Waeheru senilai Rp. 54.160.187,- yang bersumber dari kegiatan TEFA budidaya udang vanamei, jasa sewa dan penggunaan sarana prasarana sesuai TUSI.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah melakukan monitoring PNBPN secara berkala serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SUPM Waeheru dalam rangka meningkatkan capaian PNBPN.

Indikator Kinerja Utama 5 **Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)**

Indikator ini menunjukkan jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pendidikan di SUPM Waeheru. Capaian indikator Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati ditargetkan sebanyak

1 kesepakatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama yang di sepakati terkait pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia melalui kegiatan praktek kerja lapang, magang, penyerapan dan penempatan lulusan serata pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

Indikator Kinerja Utama 6

Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi (%)

Output dari proses pembelajaran adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan potensi diri mereka sudah berkembang dengan maksimal, sehingga siap untuk menghadapi tantangan baru setelah menyelesaikan pendidikan dengan jenjang tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki oleh peserta didik selama menempuh pendidikan 3 Tahun di SUPM Waeheru. Dengan dibekali sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimiliki setiap lulusan, diharapkan dapat menambah nilai jual setiap lulusan dalam mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Selain itu sertifikasi kompetensi ini penting bagi lulusan SUPM Waeheru agar dapat meningkatkan daya saing dan memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja sesuai dengan perkembangan era dunia industri global saat ini.

Lulusan yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi serta ijazah sebagai syarat untuk melamar kerja pada perusahaan-perusahaan, sehingga pihak sekolah telah melakukan pendekatan dengan berbagai perusahaan agar dapat memudahkan dan menerima lulusan untuk segera dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 7**Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)**

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pendidikan KP menetapkan kebijakan dalam proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan KP. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui jalur khusus dengan 100% Anak Pelaku Utama Perikanan (APUP). Jalur khusus adalah sistem penerimaan peserta didik dari anak pelaku utama atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, petambak garam beserta keluarga intinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan berdasarkan kuota penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDM. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak pelaku utama yang tidak mampu dalam rangka mendukung penyediaan SDM KP yang kompeten untuk tata kelola pemanfaatan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Sasaran Kegiatan 2**Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan****Indikator Kinerja Utama 8****Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan satuan pendidikan dimana akreditasi Program Studi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Akreditasi satuan pendidikan merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan dimana akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang

terstandard, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan budaya mutu pada satuan pendidikan KP terselenggara dengan baik.

Adapun tahapan proses Akreditasi meliputi yaitu evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi, penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi, dan pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Formula pengukurannya adalah satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional atau penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 9

Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)

Menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Tenaga Pendidikan bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada satuan Pendidikan. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik akan menunjukkan kualitas pendidik dalam mengajar, sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran

di dalam kelas, mempengaruhi peserta didik untuk menerima dan menyerap pelajaran yang diberikan. Kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan sertifikasi profesi dan/atau yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan teknis sesuai program studi/keahlian untuk mendukung proses pembelajaran. Tenaga Pendidik adalah dosen/guru dan tenaga pendukung pendidikan seperti laboran, teknisi tambak, teknisi hatchery, dan lain-lain yang mendukung proses pembelajaran. Formula pengukurannya berupa akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Sasaran Kegiatan 3

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja Utama 10

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)

Sesuai dengan Nota dinas dari Itjen Nomor : 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2025, diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025).

Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru merupakan indikator yang menunjukkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Itjen

KKP dari hasil audit, reviu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran), ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian IKU 10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)

IKU-10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)									
Realisasi TW I				2025				Rencana Kegiatan SUPM Waeheru 2025 – 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
100	100	100	100	85	85	100	-15	85	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan target 85% memperoleh realisasi sebesar 85% atau persentase capainnya sebesar 100% dari target. Capaian ini sebagaimana Surat Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP" Nomor : B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP". Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar -15% karena adanya perubahan penetapan target dan realisasi sedangkan perbandingan persentase capaian kinerja terhadap target Renstra Tahun 2025 sebesar 100%.

Faktor penyebab Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah percepatan penyelesaian temuan, serta pendampingan penyelesaian tindak lanjut temuan yang dilakukan oleh tim Itjen KKP.

Kegiatan pendukung keberhasilan IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025) yang berstatus Tuntas.

Tabel 7. Perbandingan capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan SUPM lain.

NO	Unit Kerja	Target IKU TW I 2025 (%)	Capaian IKU TW I 2025 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	85,00	80,43	94,62
2	SUPM Ladong Aceh	85,00	85,00	100,00
3	SUPM Pariaman	85,00	85,00	100,00
4	SUPM Kota Agung	85,00	85,00	100,00
5	SUPM Pontianak	85,00	85,00	100,00
6	SUPM Sorong	85,00	85,00	100,00
7	SUPM Waeheru	85,00	85,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan target IKU yang sama dan Capaian IKU yang berbeda sehingga Capaian IKU SUPM Waeheru yaitu 85 dari target 85 dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja Utama 11

Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit Eselon I Kementerian

Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 12

Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya atau pada Semester I Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 13

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Sesuai dengan Nota dinas dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian IKU 13 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)

IKU-13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)									
Realisasi TW I				2025				Rencana Kegiatan SUPM Waeheru 2025 – 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	80	100	120	100	80	120

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan target 80% memperoleh realisasi sebesar 100% atau persentase capainnya sebesar 120% dari target. Capaian ini sebagaimana Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : B.3241/BPPSDM.1/PL.410/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2025. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 100% dikarenakan IKU ini adalah IKU baru yang tidak di targetkan pada tahun-tahun sebelumnya sedangkan perbandingan persentase capaian kinerja terhadap target Renstra Tahun 2025 sebesar 120%.

Faktor penunjang keberhasilan IKU ini adalah dengan melakukan update data pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara berkala.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya monitoring data pengadaan setiap saat oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa SEKJEN KKP serta bagian PBJ BPPSDM KP.

Tabel 9. Perbandingan capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan SUPM lain

NO	Unit Kerja	Target IKU TW I 2025 (%)	Capaian IKU TW I 2025 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	80	100	120
2	SUPM Ladong Aceh	80	100	120
3	SUPM Pariaman	80	100	120
4	SUPM Kota Agung	80	100	120
5	SUPM Pontianak	80	100	120
6	SUPM Sorong	80	100	120
7	SUPM Waeheru	80	100	120

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan SUPM lain dengan target IKU yang sama dan capaian IKU yang sama sehingga capaian IKU SUPM Waeheru yaitu 100 dari target 80 dengan persentase capaian 120%.

Indikator Kinerja Utama 14

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di SUPM Waeheru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025, Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%), Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%), Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN

dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%), Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%), Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%), Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%). Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada akhir Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 15

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan Capaian Output. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya atau pada Semester I Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 16

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku

Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya keadaan kebijakan Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya atau pada Semester I Tahun 2025 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Utama 17

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)

IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru merupakan Indikator Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, Bidang Pelayanan publik, dan layanan perkantoran. Capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IKU 17 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)

IKU-17. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)									
Realisasi TW I				2025				Rencana Kegiatan SUPM Waeheru 2025 – 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	% Kenaikan TW I 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	25	25	100	-75	100	25

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan target 25% memperoleh capaian sebesar 25% atau persentase capainnya sebesar 100% dari target. Capaian ini sebagaimana matriks Rekapitulasi Dokumen pendukung yang merupakan Capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru. Jika

dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebesar -75% hal ini dikarenakan adanya perubahan penetapan target sedangkan capaian kinerja terhadap target Renstra 2025 adalah 25%.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini dengan melakukan kegiatan di masing-masing bidang yaitu Bagian Umum, Wakil Kepala Sekolah, E-Pegawai/SIASN, Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Pelayanan Publik, SPIP, dan BMN untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Faktor Penunjang keberhasilan IKU ini adalah diperoleh dari Pelaksanaan Kegiatan dan tertibnya Pelaporan yang disampaikan tepat waktu oleh Bagian Umum, Wakil Kepala Sekolah, E-Pegawai/SIASN, Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Pelayanan Publik, SPIP, dan BMN.

Tabel 11. Perbandingan capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan SUPM Lain.

NO	Unit Kerja	Target IKU TW I 2025 (%)	Capaian IKU TW I 2025 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	24	24	100
2	SUPM Ladong Aceh	22	22	100
3	SUPM Pariaman	22	22	100
4	SUPM Kota Agung	21	21	100
5	SUPM Pontianak	24	24	100
6	SUPM Sorong	28	28	100
7	SUPM Waeheru	25	25	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan SUPM lain dengan target IKU yang berbeda dan capaian IKU yang berbeda juga sehingga capaian IKU SUPM Waeheru yaitu 25 dari target 25 dengan persentase capaian 100 %.

C. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025 per jenis belanja dan jenis kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Realisasi Anggaran per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu + Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Non Blokir Efisiensi (Rp)	Realisasi OMSPAN	%
1	Belanja Pegawai (51)	9.216.056.000	9.216.056.000	2.015.200.175	21,87
2	Belanja Barang (52)	7.121.449.000	4.167.348.000	869.215.136	12,21
3	Belanja Modal (53)	-	-	-	-
TOTAL		16.337.505.000	13.383.404.000	2.884.415.311	17,66

Tabel 13. Realisasi Anggaran per jenis kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Pagu + Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Non Blokir Efisiensi (Rp)	Realisasi OMSPAN (Rp)	%
1	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan	15.000.000	3.000.000	0	0,00
2	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi	60.000.000	16.650.000	0	0,00
3	Pelantikan Peserta Didik Baru	282.160.000	0	0	0,00
4	Pengajaran dan Perkuliahan	2.037.560.000	698.313.000	64.308.450	3,16
5	Sertifikasi Peserta Didik	262.630.000	124.598.000	18.720.000	7,13
6	Pendidikan Karakter	58.340.000	46.340.000	9.253.800	15,86
7	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik	1.495.110.000	1.495.110.000	326.116.000	21,81
8	Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	60.000.000	5.070.000	150.000	0,25
9	Gaji dan Tunjangan	9.216.056.000	9.216.056.000	2.015.200.175	21,87
10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.790.649.000	1.773.747.000	449.826.886	25,36
11	Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	60.000.000	4.520.000	840.000	1,40
TOTAL		16.337.505.000	13.383.404.000	2.884.415.311	17,66

Tabel 14. Realisasi Anggaran Per IKU dan Efisiensi Anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama	Target TW I Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Persentase Capaian (%)	Kegiatan Pendukung di RKAKL	Pagu Anggaran + Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Anggaran Non Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Blokir Efisiensi (Rp)	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Persentase (%)	Efisiensi	
SK.1. Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten											
1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	-	-	0,00	Dukungan Kemitraan DUDI dan Serapan Lulusan	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00
2	Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	-	-	0,00	Pengajaran dan Perkuliahan	2.037.560.000	698.313.000	1.339.247.000	64.308.450	3,16	96,84
3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	-	-	0,00	Pendidikan Karakter	58.340.000	46.340.000	12.000.000	9.253.800	15,86	84,14
4	Nilai PNPB satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	-	-	0,00	Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik	1.495.110.000	1.495.110.000	0	326.116.000	21,81	78,19
5	Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	-	-	0,00	Dukungan Kemitraan DUDI dan Serapan Lulusan	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00
6	Persentase lulusan SUPM Waeheru yang besertifikasi kompetensi (%)	-	-	0,00	Sertifikasi Peserta Didik	262.630.000	124.598.000	138.032.000	18.720.000	7,13	92,87

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama		Target TW I Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Persentase Capaian (%)	Kegiatan Pendukung di RKAKL	Pagu Anggaran + Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Anggaran Non Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Blokir Efisiensi (Rp)	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Persentase (%)	Efisiensi
7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	-	-	0,00	Pelantikan Peserta Didik Baru	282.160.000	0	282.160.000	0	0,00	100,00
SK.2. Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan											
8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)	-	-	0,00	Dukungan Fasilitas Penjaminan Mutu	10.000.000	1.500.000	8.500.000	0	0,00	100,00
9	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)	-	-	0,00	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi	60.000.000	16.650.000	43.350.000	0	0,00	100,00
SK.3. Terpenuhiya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker											
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	85	100	117,65	Layanan Manajemen Keuangan	60.000.000	4.520.000	55.480.000	840.000	1,40	98,60
11	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	0,00	Dukungan Fasilitas Penjaminan Mutu	10.000.000	1.500.000	8.500.000	0	0,00	100,00

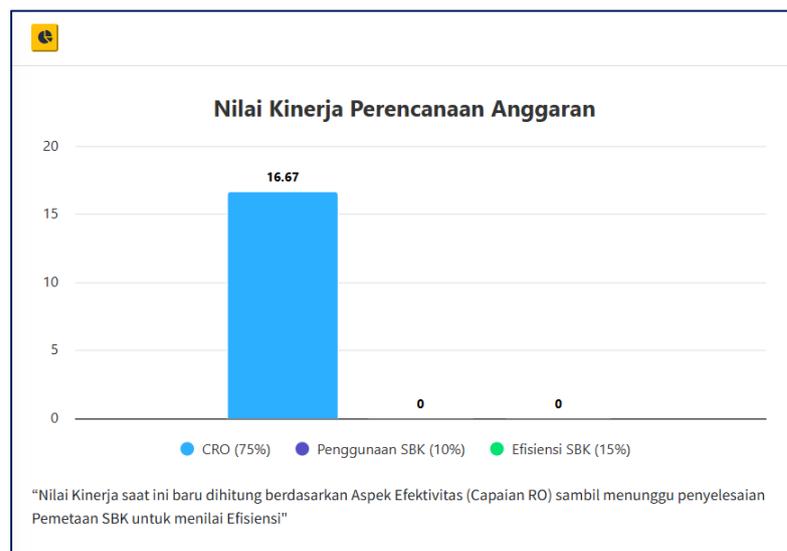
Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Utama		Target TW I Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Persentase Capaian (%)	Kegiatan Pendukung di RKAKL	Pagu Anggaran + Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Anggaran Non Blokir Efisiensi (Rp)	Pagu Blokir Efisiensi (Rp)	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Persentase (%)	Efisiensi
12	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	-	-	0,00	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi	60.000.000	16.650.000	43.350.000	0	0,00	100,00
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	80	92,49	115,61	Layanan Manajemen Keuangan	60.000.000	4.520.000	55.480.000	840.000	1,40	98,60
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	-	-	0,00	Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pendidikan KP	60.000.000	5.070.000	54.930.000	150.000	0,25	99,75
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	0,00	Layanan Manajemen Keuangan	60.000.000	4.520.000	55.480.000	840.000	1,40	98,60
16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	-	-	0,00	Layanan Manajemen Keuangan	60.000.000	4.520.000	55.480.000	840.000	1,40	98,60
17	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)	25	25	100,00	Layanan Perkantoran	12.006.705.000	10.989.803.000	1.016.902.000	2.465.027.061	20,53	79,47
NKO				112,47		16.337.505.000	13.383.404.000	2.954.101.000	2.884.415.311	17,66	82,34

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

SUPM Waeheru sebagai organisasi yang menyelenggarakan sektor pendidikan menengah dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks.

Perhitungan nilai Efisiensi telah tersedia berbasis system dan dikembangkan oleh kementerian keuangan RI melalui aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>.



Gambar 8. Perhitungan Efisiensi Anggaran SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025

Nilai Efisiensi SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/> belum tercatat atau dengan nilai 0. Hal ini disebabkan karena Nilai Kinerja saat ini pada aplikasi monev kemenkeu baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) hingga menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi. Nilai Efisiensi didapatkan dari Efisiensi yang memiliki Rentang Nilai dari +20 sampai -20.



BAB IV. PENUTUP

- Capaian Kinerja Utama
- Permasalahan dan Rekomendasi



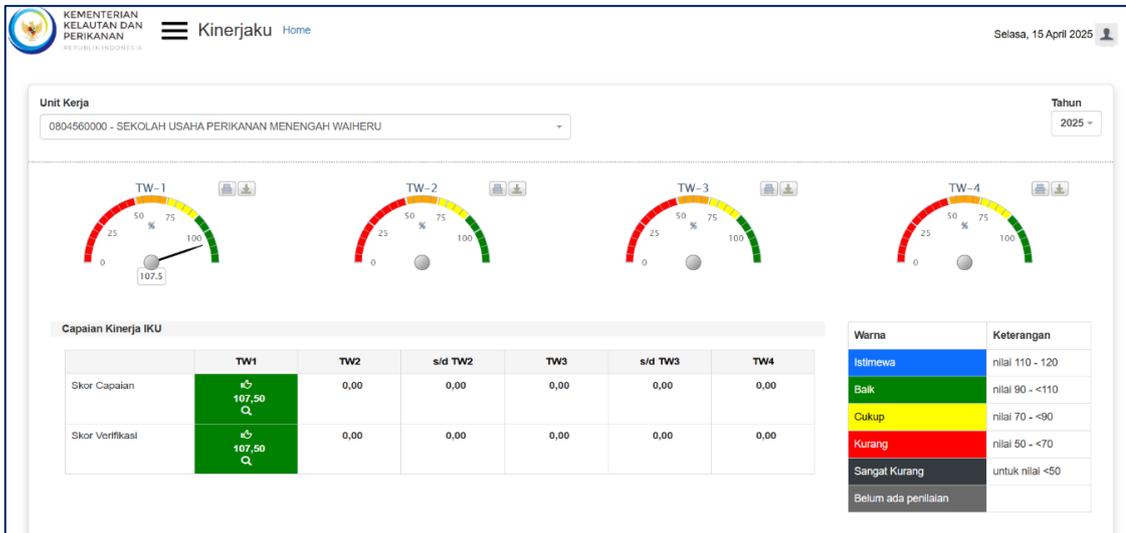
BAB IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, SUPM Waeheru memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi KKP melalui kegiatan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemberian pelajaran dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan; pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa; pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa, dan masyarakat; pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perlengkapan.

Pada tanggal 30 Januari Tahun 2025 SUPM Waeheru telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala SUPM Waeheru dengan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja Utama. Adapun Pada Triwulan I Tahun 2025 SUPM Waeheru menargetkan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama sedangkan sisanya akan diukur pada Triwulan selanjutnya. Pengukuran capaian kinerja SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator atau disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi KinerjaKu dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SUPM Waeheru Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107,50 terlihat pada dashboard aplikasi kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 9. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025

Selama Triwulan I Tahun 2025 dari 3 Indikator Kinerja Utama SUPM Waeheru yang ditargetkan terdapat 1 IKU Berstatus Istimewa dan 2 IKU yang Berstatus Baik sehingga secara umum kinerja SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025 tergolong Baik. Rincian target dan realisasi dari 3 indikator kinerja utama tersebut adalah :

1. Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru dengan Target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 85 (%) dengan realisasi yang dicapai sebesar 85 (%).
2. Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru dengan Target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 80 (%) dengan realisasi yang dicapai sebesar 100 (%)
3. Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru dengan Target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 25 (%) dengan realisasi yang dicapai sebesar 25 (%).

Tabel 15. Target Indikator Kinerja Utama dengan capaian TW I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I TAHUN 2025	CAPAIAN TW I TAHUN 2025	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	0	0	0
		2	Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	0	0	0
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	0	0	0
		4	Nilai PNBPN satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	0	0	0
		5	Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	0	0	0
		6	Persentase lulusan SUPM Waeheru yang bersertifikasi kompetensi (%)	0	0	0
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	0	0	0
2	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)	0	0	0
		9	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)	0	0	0
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	85	85	100
		11	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	0	0	0
		12	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	0	0	0
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	80	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW I TAHUN 2025	CAPAIAN TW I TAHUN 2025	PERSENTASE (%)
		14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	0	0	0
		15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	0	0	0
		16 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	0	0	0
		17 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)	25	25	100

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja SUPM Waeheru telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan tercapai secara optimal sesuai dengan realiasi Triwulan I Tahun 2025, semua target yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik dan terdapat 1 (satu) IKU yang berstatus “**Istimewa**” sehingga sangat mempengaruhi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di Triwulan I Tahun 2025.

1. Permasalahan

Semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025 tercapai dengan baik bahkan berstatus Baik, hal ini disebabkan karena semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaannya.

2. Rekomendasi

Keberhasilan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025 tidak lepas dari pemantauan realisasi dan capaian kinerja secara berkala dari semua target yang telah ditetapkan oleh karena itu direkomendasikan untuk tetap melakukan pemantauan pencapaian untuk target-target IKU pada Triwulan berikutnya.

Demikian laporan kinerja ini dibuat agar dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kegiatan SUPM Waeheru pada Triwulan I Tahun 2025. Harapan kami kiranya laporan ini dapat digunakan untuk melengkapi laporan-laporan yang telah disampaikan sebelumnya serta memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders SUPM Waeheru. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja SUPM Waeheru sekaligus sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk membangun SUPM Negeri Waeheru Ambon yang lebih baik.



Laporan Kinerja
Triwulan I Tahun 2025

LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAEHERU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Azis Usemahu**

Jabatan : Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Plt.Kepala Pusat Pendidikan KP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Waeheru

Abdul Azis Usemahu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAEHERU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	90
		2	Jumlah lulusan SUPM Waeheru (Orang)	107
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang kompeten (Orang)	183
		4	Nilai PNBSP satker SUPM Waeheru (Rp. Miliar)	0,475
		5	Kerjasama SUPM Waeheru yang disepakati (Kesepakatan)	1
		6	Persentase lulusan SUPM Waeheru yang besertifikasi kompetensi (%)	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Waeheru (%)	100
2	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	8	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Waeheru (Lembaga)	1
		9	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Waeheru yang tersertifikasi (Orang)	20
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Waeheru (%)	85
		11	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Waeheru (Nilai)	81
		12	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Waeheru (Indeks)	84
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Waeheru (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Waeheru (%)	80
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Waeheru (Nilai)	71,5
17	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Waeheru (%)	100		

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	4.210.800.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12.126.705.000
Total Anggaran SUPM Waeheru Tahun 2025		16.337.505.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Waeheru

Abdul Azis Usemahu

Prepared by:

SUPM Waiheru

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kementerian Kelautan dan Perikanan

 (0911) 361111  supmwaiheruambon@yahoo.com  @SUPM_WAIHERU